

DEWAN KERJA SAMA NEGARA-NEGARA TELUK: Sebuah Cakrawala Baru di Timur Tengah

Sutomo ROESNADI*

PENDAHULUAN

Pola hubungan internasional yang terjadi setelah Perang Dunia II selesai ialah munculnya tidak saja badan kerja sama universal dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa, tetapi juga berkembangnya badan-badan kerja sama regional yang kegiatan dan keanggotaannya terbatas pada wilayah tertentu. Tidak jarang terjadi keanggotaannya menjadi lintas regional, karena kepentingan-kepentingan tertentu negara-negara besar. Misalnya NATO tidak hanya beranggotakan negara-negara Eropa Barat, tetapi juga Amerika Serikat dan Kanada; demikian juga halnya dengan SEATO yang telah dibubarkan. Badan-badan kerja sama regional yang tampaknya agak murni ialah ASEAN, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), dan mungkin juga MEE. Walaupun demikian kita lihat juga adanya keanggotaan lintas regional, misalnya dalam MEE, karena masuknya beberapa negara anggota di luar wilayah Eropa Barat.

Tumbuhnya badan-badan kerja sama regional tersebut memang dimungkinkan dengan adanya Pasal-pasal 51, 52, 53 dan 54 dari Piagam PBB. Walaupun Piagam PBB sendiri tidak memberi penjelasan, pengaturan kerja sama regional tersebut tampaknya diperuntukkan bagi tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional di tingkat regional. Pasal 53 Piagam selanjutnya mengatakan bahwa badan-badan kerja sama regional tersebut nantinya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari PBB dalam melaksanakan perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 53 tersebut tidak bertentangan atau serasi dengan Pasal 33 Piagam PBB yang mengatakan bahwa negara-negara yang bersengketa sebaiknya sejauh mungkin menyelesaikan sengketanya sendiri sebelum masalah tersebut

*Dr. Sutomo ROESNADI adalah Dosen FIS-UI dan bekas Direktur Studi Pembangunan Indonesia, FIS-UI — ISS Den Haag.

diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Tidak semua badan kerja sama regional ditujukan untuk maksud-maksud pertahanan dan keamanan, tetapi sementara di antaranya adalah untuk kerja sama ekonomi, sosial, dan kebudayaan, seperti ASEAN dan MEE.

Di antara badan-badan kerja sama regional yang tertua yang jauh sebelum PBB dan kelompok-kelompok regional lainnya didirikan, ialah *The International Union of American Republics* yang dicetuskan pada tahun 1889, kemudian pada tahun 1910 berubah namanya menjadi *Pan American Union*, dan setelah tahun 1945 lebih terkenal dengan nama *Organization of American States* (OAS), yang merupakan wadah kerja sama negara-negara di benua Amerika.

Di benua Asia, organisasi kerja sama regional *Liga Arab* merupakan bentuk kerja sama regional yang tertua. Setelah konperensi pendahuluan diadakan di Alexandria (Mesir) pada bulan September 1944, maka kemudian disepakati pendiriannya pada tanggal 22 Maret 1945. Wilayah keanggotaan Liga Arab cukup luas, yaitu dari Mauritania di Afrika paling Barat sampai ke negara-negara Arab di Afrika Utara, Arab Saudi dan yang paling ujung Timur di negara Teluk yaitu Oman.

Bentuk kerja sama regional Liga Arab cukup luas mencakup berbagai macam masalah politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Dalam kerja sama politik dan militer, misalnya, di samping ikut menyelesaikan persengketaan antara negara anggota, menghadapi kemungkinan serangan dari luar dengan cara bagaimana menanggulangnya, antaranya dengan prinsip bela diri, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Kasus yang menonjol ialah dibentuknya Inter-Arab Force sewaktu terjadi krisis Irak—Kuwait tahun 1961.

Masalah yang paling pelik yang dihadapi Liga Arab sedari berdirinya sampai sekarang ialah bagaimana dengan secara kompak negara-negara anggota Liga Arab dapat menghadapi Israel. Seandainya terwujud suatu persatuan yang mantap dan kokoh, dan di antara mereka dapat menyingkirkan masalah-masalah kepentingan nasional masing-masing dan mengkonsentrasikan diri terhadap masalah Israel, mungkin masalah Arab-Israel tidak akan berkepanjangan sedemikian jauhnya. Masalah Arab-Israel tidak mendapat perhatian sepenuhnya, karena negara-negara anggota Liga Arab saling bertrok, dan saling berlomba untuk mendominasi antara negara anggota Liga Arab yang satu terhadap yang lainnya.

Memasuki dekade tahun 1960an, tahun 1970an dan tahun 1980an, masalah yang dihadapi Liga Arab, tidak hanya semata-mata masalah Israel,

ataupun masalah sesama negara anggota Liga Arab sendiri, tetapi juga mulai merembesnya pengaruh komunis ke wilayah Timur Tengah. Bermula dengan pengaruh Uni Soviet di Mesir, kemudian menjalar ke Aljazair, Irak, Suriah, Yaman Selatan, serta negara-negara Tanduk Afrika seperti Etiopia. Seakan-akan perembesan pengaruh Uni Soviet tersebut tidak henti-hentinya berkembang, kita turut menyaksikan pula adanya invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang secara geografis sangat berdekatan dengan negara-negara Teluk.

Perselisihan antara negara-negara Liga Arab sendiri selalu timbul dan tenggelam, dari usaha-usaha Mesir, Suriah dan Irak untuk membentuk Republik Persatuan Arab tahun 1960an, yang kemudian pecah lagi, sampai usaha untuk menegakkannya kembali antara Suriah dan Libia pada permulaan tahun 1981 yang belum terlaksana sampai saat ini. Lepasnya Mesir dari pengaruh Uni Soviet setelah perang Yomkipur bulan Oktober 1973, telah menimbulkan keadaan yang sama sekali berbalik sama sekali, yaitu dengan tidak tanggung-tanggungnya bagi Mesir untuk berpihak kepada Amerika Serikat, yang kemudian mengadakan perdamaian tersendiri dengan Israel berdasarkan persetujuan Camp David. Sudah tentu hal ini menimbulkan konsekuensi yang lebih jauh lagi, yaitu dengan dikucilkannya Mesir dari keanggotaan Liga Arab, dan malahan memindahkan Markas Liga Arab dari Kairo ke salah satu negara anggota Liga Arab lainnya.

Dalam menghadapi perang Irak - Iran anggota-anggota Liga Arab terpecah; misalnya Arab Saudi dan Yordania di pihak Irak, sedangkan Suriah dan Libia di pihak Iran. Walaupun Irak dan Suriah diperintah oleh Partai Revolusioner Baath, tetapi mereka dalam pola kedudukan yang bertentangan. Mayoritas penduduk Arab Libia dan Suriah adalah Muslim Suni, sedangkan mereka bekerja sama dengan orang-orang Iran yang Muslim Shia. Jadi terlihat bahwa pengelompokan negara-negara Arab dalam menghadapi sengketa di kawasan Timur Tengah tersebut kadang-kadang menurut pertimbangan secara logika tidak masuk di akal. Ambisi setiap pemimpin negara-negara Liga Arab untuk saling mendominasi wilayah Arab lainnya tetap ada, misalnya ada kemungkinan bahwa Irak ingin membentuk suatu poros baru di Timur Tengah antara Irak, Arab Saudi dan Yordania untuk menggantikan poros lama antara Mesir, Arab Saudi dan Iran.

Apakah kekurangberhasilan Liga Arab ini disebabkan karena jumlah keanggotaannya terlalu banyak yang tersebar melintasi wilayah demikian luas yaitu dari Afrika paling Barat sampai ke ujung negara Teluk. Ataukah karena terdapat pengaruh-pengaruh dari luar region, yang tidak menginginkan bersatu-padunya negara-negara Liga Arab tadi. Walaupun mereka sama-sama rumpun bangsa Arab, tetapi mereka telah terpisah dalam lingkungan atau

wilayah yang begitu berjauhan untuk beberapa abad lamanya, sehingga terbentuk semacam polarisasi adat-istiadat, budaya, dan sikap sosial yang berbeda-beda dengan bangsa Arab aslinya.

LAHIRNYA DEWAN KERJA SAMA NEGARA-NEGARA TELUK: SEBUAH LATAR BELAKANG

Berbagai aspek dan masalah telah melatarbelakangi dan mendorong terbentuknya organisasi kerja sama regional negara-negara Teluk. Dengan diumumkannya oleh Pemerintah Inggris, bahwa setelah tahun 1971 pasukan-pasukan Inggris akan menarik diri dari Timur Suez, maka telah timbul kekhawatiran di antara sementara negara-negara Arab, terutama di sekitar wilayah Teluk, akan terjadinya kekosongan tersebut. Hal ini disebabkan karena di antara mereka sendiri belum ada yang cukup mampu untuk menggantikan kedudukan militer Inggris tersebut. Mampu tidak hanya sekedar dalam kekuatan fisik militer, tetapi juga secara politis dan diplomatis, dan negara manapun yang sanggup mengganti kedudukan Inggris tersebut harus pula mampu bertindak sebagai negara pemersatu (unifier).

Usaha-usaha antara negara-negara Arab sendiri memang pernah dicoba, misalnya antara Arab Saudi, Irak dan Iran, tetapi juga tidak menghasilkan sesuatu kesepakatan, karena ternyata lebih banyak perbedaan-perbedaannya. Pada tahun 1976 lima Menteri Luar Negeri negara-negara besar Teluk (antaranya Iran, Irak dan Arab Saudi) mengadakan pertemuan di Muscat (Oman) untuk membicarakan masalah pertahanan dan keamanan di wilayah Teluk, tetapi juga berakhir dengan kegagalan. Sewaktu Shah Iran masih hidup, iapun pernah membuat saran dibentuknya semacam pakta militer di antara negara-negara Teluk, tetapi dianggap oleh negara-negara Teluk sendiri hal itu dianggap sebagai usaha provokatif, dan Irak sendiri khawatir bahwa setiap usaha pembentukan kelompok regional akan membahayakan ideologi Irak.

Baru setelah timbul pergolakan-pergolakan di Iran, yang kemudian disusul dengan pendudukan Afghanistan oleh tentara Uni Soviet serta perang Irak-Iran, maka timbul kesadaran antara negara-negara Teluk akan pentingnya mengkonsolidasikan kekompakan dan persatuan mereka untuk melindungi kepentingan bersama. Dengan retaknya persatuan dan kesatuan negara-negara anggota Liga Arab sendiri, maka tidak mungkin negara-negara di sekitar wilayah Teluk mengandalkan perlindungannya pada Liga Arab tersebut. Faktor wilayah geografis yang saling berjauhan dan faktor logistik merupakan masalah-masalah tidak mudah untuk mengirim bala bantuan pada

waktu keadaan darurat. Dibentuknya Inter Peace-Keeping Arab/Force tahun 1961 di waktu krisis Kuwait mungkin satu-satunya usaha Liga Arab yang berhasil, yang pada dewasa ini kiranya sukar untuk diulang kembali.

Adanya kecenderungan campur tangan langsung atau tidak langsung dari negara-negara superpower dalam masalah-masalah Timur Tengah telah tampak dengan jelas. Uni Soviet, misalnya, di samping memberi bantuan terutama ekonomi dan militer kepada negara-negara Timur Tengah seperti Mesir (sampai tahun 1973), Irak, Suriah, Yaman Selatan, Libia, dan kemungkinan nantinya juga Yordania, maka negara-negara penerima bantuan tersebut umumnya juga diikat dengan apa yang disebut Perjanjian Persehabatan dan Perdamaian yang berjangka antara 15-20 tahun, dan Suriah merupakan negara terakhir yang diikat oleh Uni Soviet dengan perjanjian tersebut dua tahun yang lalu.

Di samping memperagakan kekuatan fisiknya, tidak lupa pula Uni Soviet mendemonstrasikan kelihayan diplomasi internasionalnya, mengenai masalah Timur Tengah, terutama masalah Teluk. Gagasan pembentukan Sistem Keamanan dan Perdamaian Kolektif di Teluk telah dilancarkan oleh Presiden Leonid Brezhnev sewaktu kunjungannya ke India pada bulan Desember 1980. Gagasannya sendiri cukup menarik dan memperoleh reaksi positif dari sementara negara Arab, antaranya dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Namun demikian, semacam ada prasyarat, bahwa dalam Sistem Keamanan dan Perdamaian di wilayah Teluk tersebut, harus ada kehadiran negara-negara besar.

Sedangkan pihak Amerika Serikat sendiri tidak mau ketinggalan dalam usahanya untuk ikut ramai-ramai berkecimpung dalam masalah-masalah Timur Tengah pada umumnya, dan masalah-masalah negara-negara Teluk pada khususnya, karena kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sangat besar untuk membiarkan masalah Teluk diserahkan pada satu pihak saja. Suplai minyak dari negara-negara Teluk ke negara-negara non-komunis berjumlah 40%, sedangkan Selat Hormuz yang berada di hadapan Kesultanan Oman merupakan lalu lintas tanker sebanyak 70% untuk pengapalan minyak ke negara-negara Barat. Bagaimana akibatnya apabila sengketa Irak-Iran atau negara-negara Arab lainnya (misalnya hampir meletusnya sengketa Yordania—Suriah) terus berlangsung, dan ancaman dan serbuan Uni Soviet ke negara-negara Teluk menjadi kenyataan.

Dalam rangka pemikiran tersebut di ataslah maka Amerika Serikat menawarkan pemberian bantuan militer kepada negara-negara Teluk, antaranya suatu Pasukan Gerak Cepat (Rapid Deployment Force) yang berjumlah kurang lebih 200.000 orang. Sedangkan kemungkinan lainnya ialah

dibentuknya pasukan gabungan negara-negara Barat (Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, Perancis dan Jepang). Bantuan persenjataan militer yang segera dikirimkannya ialah alat radar kepada Arab Saudi yang secara sangat sensitif sekali dapat mendeteksi setiap rencana serangan udara ke wilayah Arab (AWACS). Sementara itu Amerika Serikat kelihatannya berhasil membujuk Kenya dan Somalia (di Tanduk Afrika), dan Oman, negara Teluk, untuk mempergunakan pangkalan-pangkalan mereka bagi pasukan-pasukan Amerika Serikat. Sedangkan Mesir atas kesediaannya sendiri malahan menawarkan pangkalan-pangkalan militernya untuk dipakai oleh tentara Amerika Serikat. Suatu latihan bersama antara pasukan Mesir dan Amerika Serikat di padang pasir Sahara Mesir telah dilangsungkan beberapa bulan yang lalu.

Negara-negara Teluk menyadari pula bahwa setiap kehadiran tentara asing di wilayah mereka akan menimbulkan pancingan reaksi dari tentara asing lainnya (dalam hal ini tentu saja antara Amerika Serikat versus Uni Soviet). Karena itulah mereka lebih suka hanya menerima bantuan militer saja, tanpa hadirnya tentara dari negara pemberi bantuan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan gagasan pembentukan kerja sama regional negara-negara Teluk tersebut, pertama-tama Kuwaitlah yang mengajukan usulnya sewaktu berlangsung KTT Liga Arab di Amman pada bulan Nopember 1980. Kemudian pada KTT Islam (OKI) ke-3 di Ta'if pada tanggal 25-27 Januari 1981, para pemimpin delegasi Persatuan Arab Emirat (PAE), bersepakat untuk membentuk badan kerja sama regional di wilayah Teluk yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang politik, ekonomi dan keamanan di kawasan tersebut.

Pada pertemuan khusus di Riyadh tanggal 5 Pebruari 1981 antara kelima Menteri Luar Negeri negara-negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Persatuan Arab Emirat, Qatar dan Oman, mereka membahas dengan lebih terperinci lagi gagasan pembentukan badan kerja sama regional negara-negara Teluk tersebut. Baru pada pertemuan para Menlu ke-enam negara Teluk (yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, PEA, Qatar dan Oman) di Muscat, Oman, antara tanggal 9—10 Maret 1981 disepakati pembentukan badan kerja sama regional negara-negara Teluk dengan nama: *Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk* (Gulf Cooperation Council).

Setelah disiapkan oleh pertemuan keenam Menlu negara-negara Teluk di Abu Dhabi (Persatuan Arab Emirat) pada tanggal 24 Mei 1981, maka akhirnya Piagam Persetujuan Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council) ditandatangani oleh keenam Kepala Negara Negara-Negara Teluk pada tanggal 26 Mei 1981.

Rancangan Anggaran Dasar dari Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk meliputi 23 Pasal, yang antaranya melibatkan kerjasama keenam negara tersebut dalam berbagai bidang kegiatan, antaranya: (a) kerja sama efektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pertahanan dan keamanan dalam negeri; (b) meningkatkan kemampuan masing-masing anggota untuk membendung bahaya dan ancaman dari luar, yang akan mengganggu stabilitas di wilayah Teluk.

Kalau dilihat sepintas lalu, pola-pola kerja sama tersebut hampir mirip dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Piagam Liga Arab, hanya yang terdahulu lebih dikhususkan pada wilayah negara-negara Teluk. Ketika selesai pertemuan keenam Menlu negara-negara Teluk di Riyadh bulan Pebruari 1981 yang lalu, maka reaksi pertama dari negara-negara Barat dan Komunis ialah bahwa pola kerja sama regional tersebut merupakan suatu pakta militer baru. Pihak negara-negara Teluk melalui jurubicaranya Deputy Menlu Arab Saudi, Sheikh Abdullah Rahman Maori menyatakan bahwa badan kerja sama itu bukan pakta militer maupun aliansi militer.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi sendiri, Saud Al-Faizal menekankan, bahwa begitu banyak kesamaan antara keenam negara Teluk tersebut, misalnya dalam bidang agama, sosial, politik, dan budaya, sehingga kalau kesemuanya dipersatukan akan lebih mantap lagi hasilnya, demi untuk kesejahteraan dan stabilitas wilayah Teluk tersebut. Karena jika mereka berjalan sendiri-sendiri, maka tidak mungkin akan dapat digalang kekuatan yang lebih besar dan mantap dalam menghadapi masalah-masalah regional ataupun internasional. Demikian juga mereka akan mampu secara bersama-sama menghadapi serangan dari luar dan mempertahankan kepentingan mereka, tanpa ikutnya campur tangan dari negara-negara luar.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan utama dari Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk adalah untuk meningkatkan pelayanan kepentingan bersama dengan lebih baik, yang sesuai dengan kerangka kegiatan Liga Arab sendiri. Karena itu tidaklah mengherankan apabila pola kerja sama yang lebih luas dari Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk mencakup masalah-masalah: ekonomi, keuangan, budaya, sosial, kesehatan, komunikasi, informasi, paspor, dan kewarganegaraan, pariwisata, transportasi, perdagangan, douane, pengangkutan, hukum dan legislatif.

Walaupun Irak dan Iran termasuk negara-negara Teluk, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan psikologis dan kondisi dewasa ini di kedua negara tersebut tidak memungkinkan untuk diikutsertakan. Demikian juga halnya dengan Yaman Utara dan Yaman Selatan yang orientasi ideologi dan politiknya saling bertolak-belakang satu sama lain, sehingga dimasukkannya

kedua negara tersebut tidak akan membawa stabilitas bagi negara-negara Teluk lainnya, malahan diperkirakan akan memperuncing keadaan. Seperti yang diucapkan oleh Putera Mahkota Arab Saudi, Pangeran Fahd, bahwa Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk tidak dimaksudkan untuk membentuk poros-porosan, maupun blok yang ditujukan terhadap negara-negara tertentu.

Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk memiliki tiga organ utama, yaitu Dewan Kepala-kepala Negara yang bersidang 2 kali dalam setahun, kemudian Dewan Menteri, yang melakukan sidangnya sebanyak 4 kali setiap tahunnya, dan Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi. Pada waktu sidang di Abu Dhabi tanggal 26 Mei 1981, keenam kepala negara Teluk setuju untuk mengangkat Abdullah Bushara, seorang veteran diplomat Kuwait menjadi Sekretaris-Jenderal Pertama Dewan Kerja Sama Negara-Negara Teluk.

TANTANGAN YANG MENDESAK

Dua tantangan yang dihadapi oleh Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council — GCC) yang mendesak ialah: *pertama*, keamanan dan pertahanan wilayah Teluk; dan *kedua*, melestarikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa-bangsa di negara Teluk, apabila pada waktunya cadangan sumur minyak mereka menjadi kering.

Tantangan pertama, di samping adanya kemelut revolusi Islam Iran yang kemungkinan merembes ke wilayah mereka, dan akan menghancurkan tata-kehidupan kefeodalan dari keenam negara Teluk, juga adanya kemelut perang Irak-Iran, serta bayangan yang selalu menghantui mereka ialah kemungkinan serangan Uni Soviet ke wilayah Teluk lambat atau cepat akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Untuk beberapa ratus tahun negara Rusia di bawah Tsar-Tsarnya berusaha untuk memperoleh fasilitas pelabuhan airpanas di wilayah Teluk. Masih segar dalam ingatan sementara pemimpin Arab sewaktu awal Perang Dunia II, yaitu ketika Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Molotov mengatakan kepada Dubes Jerman di Moskow pada tahun 1940, bahwa "wilayah di selatan Batum dan Baku (masing-masing di negara bagian Georgia dan Azerbaijan Soviet) yang menuju ke arah Teluk Persi merupakan aspirasi dari Uni Soviet."

Kehadiran sekitar 1000 orang penasihat militer di Yemen Selatan, dan lebih dari 100,000 pasukan Uni Soviet di Afghanistan, serta juga sejumlah pasukan Uni Soviet, Kuba dan Jerman Timur di Angola, Mozambik dan Etiopia, telah memaksa keenam negara Teluk untuk juga mencurahkan

perhatian kerja sama pada bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini lebih dipergawat lagi suasananya dengan meletusnya ketegangan antara Israel dan Suriah mengenai masalah Libanon, serta juga adanya serbuan kaum ekstremis ke Masjid Agung di Mekkah baru-baru ini. Seperti diucapkan oleh para Menteri Luar Negeri Negara-negara Teluk di Abu Dhabi pada tanggal 24 Mei 1981, keamanan negara-negara Teluk adalah tanggung jawab dari wilayah negara-negara Teluk sendiri.

Mengenai ajakan kerja sama dengan negara-negara Barat di wilayah Teluk, mereka umumnya beranggapan bahwa sebaiknya negara superpowers tidak melibatkan diri dalam masalah-masalah negara Teluk tersebut. Kecuali pendapat dari Sultan Qabboos bin Sa'id dari Oman yang menyatakan kesediaannya untuk memberi fasilitas kepada Pasukan Gerak Cepat (Rapid Deployment Force) Amerika Serikat. Di samping itu Sultan Oman juga menginginkan dibentuknya pasukan patroli gabungan untuk keenam negara Teluk untuk mengamankan Selat Hormus, yang merupakan jalur nadi ekonomi negara-negara Barat.

Keenam negara Teluk tersebut merupakan produsen minyak bumi lebih dari 50% dari seluruh hasil negara-negara produsen OPEC atau meliputi hampir sejumlah 23,5 juta barrel per hari. Namun demikian hanya Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Kuwait dan Qatar yang merupakan anggota OPEC.

Saran Oman untuk membentuk pasukan patroli gabungan diperkirakan akan menelan biaya sekitar US\$ 15 juta. Tetapi saran ini akan ada kemungkinan ditolak oleh negara-negara Teluk lainnya jika ternyata terdapat pasukan negara asing di luar keenam negara Teluk tersebut.

Menghadapi tantangan masalah Libanon, maka pada pertemuan di Abu Dhabi tanggal 24 Mei 1981 keenam Negara Teluk tersebut dengan tegas mendukung Pemerintah Libanon dan Suriah dalam krisisnya menghadapi Israel mengenai masalah penempatan peluru kendali Suriah di Libanon. Tampaknya ini merupakan suatu pernyataan politik yang penting untuk memperoleh akomodasi dalam lingkungan Liga Arab pada umumnya dan perjuangan PLO pada khususnya.

Tantangan untuk jangka pendek, menengah dan panjang yang dihadapi ialah melestarikan hasil-hasil keuntungan yang diperoleh dari sumber-sumber minyak untuk generasi yang akan datang. Keenam negara anggota Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (GCC) sepakat untuk memperkokoh dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam bidang ekonomi dan kebijaksanaan pembangunan industri. Termasuk dalam rencana ini untuk in-

vestasi bersama sebesar US\$ 6 milyar sebagai modal pendahuluan. Hal ini merupakan langkah utama pertama yang sangat penting bagi keenam negara Teluk, karena dengan penghasilan sebanyak kurang lebih US\$ 450 juta sehari, maka kesalahan atau kekeliruan kebijakan ekonomi dan industri masa lampau akan dapat dicegah. Pada waktu-waktu sebelumnya, tidak jarang terjadi bahwa terdapat duplikat pembangunan industri-industri berat dan ringan di keenam negara Teluk, karena kurangnya atau tidak adanya koordinasi tadi.

Sedangkan dalam bidang politik, keenam negara Teluk juga sepakat agar Arab Saudi sebagai negara terkemuka dan terbesar di antara mereka menjadi jurubicara dalam Konferensi Liga Arab di Tunisia mengenai masalah Libanon. Adapun negara lima yang lainnya dari wilayah Teluk hanya akan mengirim wakil-wakilnya saja yang lebih rendah dari Menteri Luar Negeri.

Bercermin pada suksesnya organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa, negara-negara Teluk berpendapat bahwa untuk menjawab tantangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, maka seakan-akan seperti sebuah mata uang receh logam ada dua sisi (balik) yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain (*two sides of the coin*). Maka untuk membina keamanan bersama di wilayah Teluk, harus dihimpun segala potensi sumber ekonomi yang ada, dan secara terkoordinasi memformulasikan kebijakan bersama, seperti halnya juga yang terjadi pada MEE. Dengan potensi wilayah yang cukup besar dan usaha untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan kebijakan masa lampau, maka tidak ayal lagi, bahwa Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk akan mampu pula menghimpun kekuatan politik bersamanya.

POTENSI WILAYAH NEGARA-NEGARA TELUK

(1) Di antara keenam negara Teluk tersebut *Arab Saudilah* yang nomor satu dalam output produksi minyak bumi, sekitar 10,4 juta barrel per hari (bph) pada tahun 1979. Sedangkan produksi rata-rata setelah tahun 1978 adalah 8,28 juta - 9,00 juta bph, karena berbagai alasan, yang bukan teknis tetapi politis. Diperkirakan ladang minyak Arab Saudi berjumlah 180 milyar barrel dan cukup untuk dipakai sampai jangka waktu 60 tahun dengan produksi rata-rata seperti tahun 1978.

Namun demikian di Arab Saudi ternyata terdapat beberapa jenis bahan mineral yang cukup bernilai strategis, seperti besi, tembaga, timah, zinc, nikel, khromium, perak, emas, gypsum, pospaat, barite, dan magnesite, serta barang-barang galian lainnya.

Untuk mengalihkan kegiatan pembangunan, di samping bersandar pada minyak bumi, pemerintah Arab Saudi telah membangun pabrik-pabrik industri berat, seperti besi/baja, petrokimia, peleburan aluminium, kilang-kilang minyak, semen dan lain sebagainya. Jumlah penduduk Arab Saudi pada tahun 1979 ialah sekitar 9 juta orang, yang terbagi kurang lebih 40% penduduk perkotaan, 35% penduduk pedesaan, dan 25% nomad.

(2) *Kuwait* merupakan negara Teluk yang kedua setelah Arab Saudi dalam output produksi minyak bumi dan cadangannya. Kapasitas produksi adalah 3 juta bph, tetapi setelah tahun 1979 menurun menjadi 2,2 juta bph sampai 1,5 juta bph untuk menjaga kualitas. Cadangan minyak bumi sekitar 71,2 milyar barrel, yang nomor dua besarnya setelah Arab Saudi, dan dapat memproduksi selama 100 tahun dengan tingkat produksi seperti sekarang ini. Cadangan tersebut merupakan 1/8 dari jumlah cadangan minyak dunia. Seperti halnya dengan Arab Saudi, maka Kuwaitpun telah mulai membangun pabrik-pabrik industri berat, seperti pupuk, semen, desalinisasi air laut, drilling mud, dan bahan-bahan konstruksi. Per capita GNP Kuwait sebesar US\$ 15.000 (tahun 1980) dan rakyat Kuwait merupakan yang terkaya di dunia. Hal ini mengingatkan bahwa di tengah-tengah kekayaan yang berlimpah-limpah tersebut, penduduk Kuwait hanya berjumlah 1,2 juta orang pada tahun 1979, dan diperkirakan hanya akan bertambah menjadi antara 1,5-1,8 juta orang tahun 1985, dan 2,4-3 juta orang pada tahun 2000. Banyak kaum minoritas dari berbagai negara berdiam di Kuwait, misalnya dari Pakistan, Mesir, Arab, Iran, Eropa Barat, dan Asia serta Amerika Serikat sendiri.

(3) Produksi minyak bumi *Oman* hanya sekitar 350.000 bph. Cadangan minyaknya berjumlah 1.4 milyar barrel, cukup untuk waktu 12 tahun. Oman bukan merupakan anggota OPEC.

Kekayaan lain di samping minyak adalah tembaga. Terdapat deposit kira-kira sebesar 17 juta ton, dan akan diperoleh tembaga sebesar 2,1%, dan Oman akan dapat mengeksport sekitar 20.000 ton tembaga yang telah diolah pada pertengahan 1980.

(4) *Qatar* memproduksi minyak bumi rata-rata sebesar 500.000 bph pada tahun 1979/1980. Cadangan minyaknya sekitar 5,6 milyar barrel, cukup untuk jangka waktu 30 tahun. Hampir 90% ekonomi Qatar menyandarkan diri pada minyak. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut pada hari-hari mendatang, Qatar mulai sekarang sudah mulai melakukan diversifikasi kegiatan industrinya dalam aneka ragam proyek, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Kuwait.

(5) *Persatuan Arab Emirat (PAE)*. Tidak begitu besar dalam output produksi minyak buminya, sekitar 1,3 juta barrel bph, dan menghasilkan

devisa sebesar US\$ 12,5 milyar pada tahun 1979. Belum begitu berhasil menemukan sumber-sumber minyak baru. Namun demikian, PAE juga sementara ini berusaha untuk mendiversifikasikan kegiatan ekonomi dan industrinya, seperti halnya juga negara-negara tetangga Teluk lainnya. Di antara proyek-proyek yang terbesar ialah industri galangan kapal (dry dock) yang merupakan yang terbesar pula untuk negara-negara Teluk. Galangan tersebut sanggup melayani tanker sebesar apapun juga, dan terletak di Port Rashid, dekat Dubai.

(6) Walaupun sama-sama penghasil minyak bumi, sumber penghasilan utama *Bahrain* pada zaman dahulu adalah mutiara. Tetapi karena adanya depresi ekonomi dan saingan budidaya mutiara buatan dari Jepang, kegiatan dalam bidang mutiara tersebut mulai menurun. Tetapi pada saat yang sama mujur tiba bagi bangsa *Bahrain*, karena diketemukannya sumber penghasilan baru, yaitu minyak. Terdapat sebanyak 233 sumur minyak yang memproduksi tidak begitu besar menurut ukuran Timur Tengah. Produksi tahun 1972 sebesar 70.000 bph, dan terus menurun menjadi 51.000 bph setelah tahun 1980, dan secara bertahap akan terus diadakan pengurangan antara 4—7% setahunnya. Sumber minyak *Bahrain* kemungkinan akan habis pada awal tahun 2000, kecuali jika sumur-sumur yang ada dilakukan penggalan recovery dengan metoda baru.

Selain minyak bumi terdapat juga gas alam yang merupakan sumber utama dari *Bahrain*, terdapat di zone Khuff. Industri-industri berat penting lainnya di *Bahrain* ialah Aluminium *Bahrain Smelter (ALBA)*, yang mendapat bahan alumnianya dengan kontrak jangka panjang dengan Australia.

Di samping itu proyek industri non-minyak yang terbesar lainnya ialah Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY) yang dimiliki bersama oleh 7 negara anggota OPEC. ASRY dapat menerima reparasi tanker sampai bobot mati 500.000 ton, dan reparasi pertama diterima pada tahun 1978.

Dengan penduduk *Bahrain* berjumlah kurang lebih 400.000 tahun 1980, disusul sebanyak 772.000 dari PAE, 225.000 dari Qatar, 1,5 juta orang di Oman, 1,2 juta orang di Kuwait, dan kurang lebih 9 juta penduduk di Arab Saudi, maka jumlah penduduk keseluruhan di negara-negara Teluk adalah sekitar 12 juta orang.

MASALAH DAN PROSPEK

Jika seandainya masalah Israel dan sengketa antara negara-negara Arab sendiri tidak ada, maka tak ayal lagi negara-negara Arab secara keseluruhan,

terutama yang berada di sekitar jazirah Arab dan Teluk, akan merupakan negara-negara yang terkaya di dunia, mengingat berlimpah-limpahnya sumber kekayaan di wilayah tersebut.

Namun dalam pola hubungan internasional dewasa ini tidak ada yang dapat berdiri di atas status quo, di mana sebuah negara atau sekelompok negara dibiarkan tenang menikmati kemakmuran tersebut. Penomena interdependensi, bertambahnya penduduk negara-negara di dunia, semakin menyusutnya lahan/tanah untuk dikerjakan, semakin langkanya sumber-sumber bahan strategis, yang cenderung pula untuk menggantikan pola industri boros minyak dengan pola industri yang dikomputerkan, telah memaksa negara-negara besar tertentu untuk memaksakan kehendaknya pada negara-negara kaya di antara negara-negara berkembang. Karena tidak bersatunya negara-negara kaya yang sedang berkembang tersebut, maka negara-negara besar tadi memaksakan untuk melakukan politik divide et impera, seperti yang mereka lakukan pada zaman keemasan kolonialismenya di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Suatu hal yang paradoks yang patut dipertanyakan dalam hubungan ini ialah penjajahan Inggris telah menimbulkan rasa persatuan Arab, di mana sebelumnya mereka terpecah-pecah dalam kelompok kesukuan, kefeodalan dan saling bersaing. Tetapi persatuan dan kekompakan ini buyar kembali, begitu Inggris meninggalkan wilayah tersebut.

Adanya usaha pembentukan Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk merupakan usaha yang patut disambut dengan baik, tidak saja oleh setiap negara Timur Tengah, jika memang perdamaian serta stabilitas di kawasan tersebut ingin ditegakkan dan dipertahankan, tetapi juga oleh semua negara berkembang, dan malahan oleh negara-negara besar sendiri, karena diharapkan akan dapat menggalang persatuan di antara mereka.

Masalah bangsa Arab, terutama yang berdiam di Teluk, adalah masalah bangsa Arab sendiri, dan setiap intervensi dari kutub manapun dari dunia terhadap wilayah Teluk itu harus dienyahkan. Jika kesadaran ini dapat dihayati oleh para pemimpin bangsa Arab, maka langkah pertama yang utama dengan berdirinya Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk ini merupakan titik-titik terang yang merupakan harapan yang sangat cerah.

Bagi Indonesia sendiri munculnya Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk ini mempunyai arti penting, karena dengan secara bersama-sama Indonesia dengan ASEANnya dapat melakukan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, industri, perdagangan, teknologi dan budaya, antara kedua kawasan tersebut, maupun dengan luar wilayah negara-negara Teluk dan ASEAN. Karena terdapat persamaan sikap antara negara-negara Teluk dan

ASEAN, yaitu sama-sama anti-komunis, maka kedua kelompok regional dapat merupakan front pembendung bahaya komunis yang ampuh.

Sebagai kelompok kerja sama yang telah berdiri lebih dahulu dari kelompok negara-negara Teluk, maka pengalaman-pengalaman ASEAN dapat ditarik manfaatnya oleh negara-negara Teluk tersebut, dalam berbagai kegiatan kerja samanya. Kunjungan Presiden Soeharto ke sementara negara-negara Teluk pada tahun 1977 telah menunjukkan urgensinya peningkatan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Dalam hubungan ini pulalah maka Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja melakukan lawatan ke Bahrain, Kuwait, Qatar dan PAE antara tanggal 11—20 April 1981, untuk lebih mengkongkritkan lagi landasan hubungan yang telah diletakkan oleh Presiden Soeharto beberapa waktu yang lalu. Patut dipertimbangkan dan dipikirkan kiranya, walaupun masih terlalu dini, kemungkinan-kemungkinan mengadakan dialog, atau konsultasi antara ASEAN dengan Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk untuk masa yang tidak terlalu jauh, agar kedua kelompok kerjasama yang kebetulan sama-sama berada di kawasan Asia ini merupakan benteng kerja sama regional yang ampuh dan kokoh untuk masa-masa mendatang.

BAHAN-BAHAN REFERENSI

1. A.H. Shahab, "Gulf-Six Council for Cooperation," *The Indonesia Times*, 20 Maret 1981.
2. *The Straits Times*, 25 Mei 1981.
3. *The Straits Times*, 26 Mei 1981.
4. *Time*, 22 Oktober 1980.
5. *Gulf Guide & Diary 1981*, The Middle East Review Company, Ltd. London.
6. *Saudi Business & Arab Economic Report*, 8 Mei 1981, Vol. V, No. 4, 26, 27 Mei 1981.
7. Berita-berita Telex *Reuter*.